

1. **Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.** Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indeks inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2024 adalah sebagai berikut :

April	Mei	Juni
3,817%	4,17%	4,04%

Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,52 persen dengan IHK sebesar 108,72 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,20 persen dengan IHK sebesar 106,60. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan April 2024 mengalami deflasi sebesar 0,30 persen. Hingga April 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,19 persen. Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sumatera Barat di 4 kabupaten/kota, pada April 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 3,81 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,28 pada April 2023 menjadi 107,22 pada April 2024 Mei 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,17 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,93 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,68 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,55 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,42 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,11 persen; kelompok transportasi sebesar 0,66 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,83 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,87 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,99 persen. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Mei 2024 mengalami inflasi sebesar 0,51 persen. Hingga Mei 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,71 persen. Juni 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,04 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,71 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,46 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,16 persen; kelompok transportasi sebesar 1,92 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,09 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,77 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,83 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,74 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,27 persen. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Hingga Juni 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,85 persen.

2. **Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.** Penyebab terjadinya inflasi (kenaikan harga barang dan jasa) di Kota Padang maupun Kota Bukittinggi untuk periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy), Juni 2024 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,04 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 5,71 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman

dan tembakau sebesar 9,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,56 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,46 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,16 persen; kelompok transportasi sebesar 1,92 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,09 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,77 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,83 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,74 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,27 persen. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Juni 2024 mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Hingga Juni 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,85 persen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Alokasi anggaran pengendalian inflasi daerah diarahkan untuk program dan kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.
2. Perlunya ditingkatkan kapasitas anggota TPID untuk lebih memahami tugas dan fungsi TPID dalam upaya pengendalian inflasi Daerah.
3. Koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan komunikasi efektif antar Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi pelaksanaan.
4. Review terhadap RAD Inflasi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Bersama Tim TPID mengidentifikasi alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berkesinambungan dari TW I- TW IV.
3. Mengarahkan program kegiatan pada kegiatan :
4. Pemantauan harga dan stok
5. Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
6. Menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang dan bahan pokok
7. Pencanangan gerakan menanam
8. Operasi pasar murah
9. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor
10. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi